

**OPEN ACCESS**

## INDEKS KEBERLANJUTAN PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH) DI KOTA MALANG

Jurnal Pengembangan Kota (2021)

Volume 9 No. 1 (50–63)

Tersedia online di:

<http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpk>

DOI: 10.14710/jpk.9.1.50-63

**Indhar Wahyu Wira Harjo, Ayu Kusumastuti\*, Dewi Puspita****Rahayu, Wida Ayu Puspitosari***Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,**Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Indonesia*

**Abstrak.** Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah sebuah program yang diinisiasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jendral Cipta Karya pada tahun 2016. Pemerintah Kota Malang merupakan salah satu yang melakukan implementasi program ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran yang diimplementasikan dengan mengkombinasikan penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan arah teoritis induktif. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan metode survei dan teknik analisa data menggunakan teknik ordinasi *Rapfish*. Indeks keberlanjutan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Bareng Kota Malang yaitu 59.174. Hal ini diartikan bahwa keberlanjutan program KOTAKU masuk dalam kategori cukup. Kategori ini mengindikasikan bahwa program ini dapat dikatakan tidak terlalu berjalan dengan baik namun juga tidak terlalu berjalan buruk/tidak baik.

**Kata Kunci:** Program KOTAKU; Kota Malang; Keberlanjutan; *Rapfish*

**[Title: Sustainability Index of Malang City's Program of 'KOTAKU' (City Without Slums)].** The KOTAKU (*Kota Tanpa Kumuh/City Without Slum*) program was launched in 2016 by Indonesia's Ministry of Public Work. The administration of Malang is one of the cities that has adopted this scheme. This study employed a mixed-method approach, integrating quantitative and qualitative data with an inductive theoretical framework. The survey approach was utilized to collect data, and the *Rapfish* ordination methodology was employed to analyze it. The index of the KOTAKU (*Kota Tanpa Kumuh/City Without Slum*) program in Malang City's Bareng Region is 59.174. It is possible to conclude that the program's sustainability belongs within the 'moderate' category. This classification suggested that the project was not run well, though it wasn't poor either.

**Keywords:** KOTAKU program; Malang City; Sustainability; *Rapfish*

*Cara Mengutip:* Harjo, I. Wahyu Wira., Kusumastuti, Ayu., Rahayu, D. Puspita., & Puspitosari, W. Ayu. (2021). Indeks Keberlanjutan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kota Malang. **Jurnal Pengembangan Kota**. Vol 9 (1): 50-63. DOI: 10.14710/jpk.9.1.50-63

### 1. PENDAHULUAN

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah sebuah program yang diinisiasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jendral Cipta Karya pada tahun 2016. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar pada pemukiman kumuh perkotaan untuk mewujudkan sebuah permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Selain itu program ini juga mendukung gerakan pembangunan 100-0-100 yaitu 100 untuk akses air bersih 0 pemukiman kumuh dan 100 akses sanitasi yang layak. Program tersebut dilaksanakan di 34 Provinsi seluruh Indonesia melalui lembaga

masyarakat di desa yang disebut Badan atau lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM). Program tersebut berfokus pada kawasan kumuh di daerah Kota atau Kabupaten, dimana syarat kumuh tersebut dinamakan 7+1 indikator yang meliputi ketidakteraturan bangunan gedung, jalan lingkungan tidak memadai, ketidaktersediaan air

ISSN 2337-7062 © 2021

This is an open access article under the CC-BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>). – lihat halaman depan © 2021

\*Email [ayukusumastuti@ub.ac.id](mailto:ayukusumastuti@ub.ac.id)

Diterima 3 Maret 2021, disetujui 30 Juni 2021

minum, drainase lingkungan yang buruk, ketidakterediaan pengolahan air limbah, pengolahan sampah, ketidakterediaan sistem pengamanan kebakaran, ketidakterediaan ruang terbuka publik dan ruang terbuka hijau (Kementerian PUPR, 2015).

Pemerintah Kota Malang melakukan implementasi program, mengingat Kota Malang merupakan salah satu wilayah yang memiliki kawasan kumuh. Berdasarkan Keputusan Walikota Pemerintah Kota Malang Nomor 188.45/86/35.73.112/2015 tentang penetapan lingkungan perumahan dan pemukiman kumuh diketahui bahwa wilayah terluas untuk kategori wilayah kumuh yaitu sebesar 81,36 Ha yaitu di Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kabupaten Malang. Dalam surat keputusan tersebut juga telah ditetapkan terdapat 29 wilayah kategori kumuh. Berdasarkan penelusuran pemberitaan di media masa [radarmalang.id](http://radarmalang.id) pada tanggal 20 April 2018, diketahui bahwa lingkungan Bareng telah melakukan program KOTAKU pada 5 RW yaitu RW2, RW3, RW4, RW7 dan RW 8 dan mendapat dana sebanyak 500 juta untuk memperbaiki sanitasi, jalan lingkungan gang dan sistem persampahan. Selain itu di Tahun 2019, Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen ini juga melakukan kegiatan seperti pertemuan dan sosialisasi "Rembug Warga, Menata Kampung" dan pemanfaatan BPM (Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat). Pada tahap pelaksanaan, pembangunan terhadap kondisi jalan lingkungan dan aliran sanitasi air mulai dilakukan. Di sisi lain, upaya penghijauan juga dilakukan dengan memberi tanaman hias di sekitar wilayah kampung.

Berdasarkan hasil riset terdahulu, program KOTAKU yang terdapat di lokasi yang lain yaitu di RT 09 RW 10 di Kelurahan Kota Lama Kota Malang masih jauh seperti yang diharapkan dikarenakan kurang ada partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat hanya pada saat dilakukan pembangunan infrastruktur sehingga keberlanjutan program masih dipertanyakan (Cahyani, 2019). Penelitian lain dilakukan oleh Alfiani (2018) yang menyatakan bahwa keberhasilan program KOTAKU di lingkungan Tanjungsrejo, Kecamatan Sukun tidak lepas dari peran BKM (Badan Kesawadayaan

Masyarakat). Lembaga ini sebagai penguat dalam berjalannya program KOTAKU dan sebagai mediator dalam terjalannya kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan swasta (Alfiani, 2018). Penelitian selanjutnya tentang KOTAKU ditulis oleh Nurhasanah (2019). Nurhasanah (2019) menjelaskan implementasi program KOTAKU di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dalam pelaksanaannya, masyarakat kurang berpartisipasi, meskipun ada beberapa yang berpartisipasi memberi bantuan dalam bentuk materi atau tenaga. Penelitian lain menjelaskan bahwa program KOTAKU di Kelurahan Tlogomas berjalan dengan baik dalam hal pembangunan infrastruktur begitupun dengan akses pendidikan dan kesehatan. Namun perilaku masyarakat terhadap lingkungan masih kurang baik, ditandai dengan masih adanya warga yang membuang sampah sembarangan (Nurhasanah, 2019).

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk melengkapi kajian implementasi program KOTAKU pada kelurahan di Kota Malang, khususnya pada Kelurahan Bareng. Mengingat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang menyatakan bahwa wilayah Kelurahan Bareng menjadi wilayah terluas dalam kategori kumuh dan terdapat kegiatan dalam upaya menuju target program yaitu 100 air bersih, 0 perumahan kumuh dan 100 sanitasi air limbah yang layak.

Wilayah tempat tinggal perlu dibuat senyaman mungkin untuk membuat penghuninya dapat hidup layak. Tempat yang layak tersebut juga hendaknya ramah terhadap siapapun, pada orang tua, anak, wanita ataupun pendatang (migran). Wilayah tersebut hendaknya juga memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia sehingga dapat dikatakan layak sebagai tempat tinggal. Lingkungan kumuh bisa jadi muncul karena adanya pendatang dan mengisi sektor informal perkotaan. Pengelolaan perkotaan penting dilakukan sebagai wujud masyarakat melakukan pembangunan ke arah yang baik. Kehadiran dan keberhasilan program sangat penting, namun tidak kalah penting dalam program tersebut yaitu untuk mengukur keberlanjutannya. Keberlanjutan ini diartikan bahwa program tersebut terbukti sangat ampuh dalam menyelesaikan permasalahan

perkotaan baik pada hari ini dan generasi ini dan juga pada masa berikutnya dan generasi yang akan datang. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada pengukuran indeks keberlanjutan program KOTAKU.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan *basic research* yang bersifat mengembangkan pengetahuan dasar mengenai dunia sosial. Penelitian dasar (*basic research*) berusaha menjelaskan mengenai bagaimana dunia sosial bekerja, apa yang memungkinkan sesuatu terjadi, mengapa hubungan sosial terjadi dengan cara tertentu dan mengapa masyarakat mengalami perubahan (Neuman, 2007). Implementasi model penelitian dasar dalam riset ini mengarahkan peneliti untuk menjelaskan mengenai keberlanjutan program KOTAKU yang berlangsung di Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang.

Pengujian dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif relevan dengan paradigma *postpositivis* yang mengimplementasikan cara berpikir deduktif (Cresswell, 2015). Tujuan penelitian ini melakukan deskripsi mengenai keberlanjutan program KOTAKU di Kelurahan Bareng. Deskripsi tersebut memberikan gambaran yang rinci mengenai pelaksanaan program penanggulangan kawasan kumuh di Kota Malang. Gambaran rinci tersebut diperoleh dengan menggunakan instrumen penelitian dan alat bantu ukur indeks keberlanjutan bernama *Rapid Appraisal for Fisheries* (RAPFISH). *Rapfish* merupakan teknik pengukuran cepat untuk melakukan evaluasi keberlanjutan sejumlah aspek dalam perikanan menggunakan *Multi-Dimensional Scaling* (MDS) (Pitcher & Preikshot, 2001).

Peneliti akan memodifikasi *Rapfish* dalam penelitian ini untuk mengukur keberlanjutan program KOTAKU di Kelurahan Bareng. Modifikasi terutama dilakukan dalam menentukan atribut dan indikator keberlanjutan. Modifikasi tersebut mengacu kepada ukuran keberlanjutan yang digunakan Kementerian PUPR dalam mengukur Indeks Keberlanjutan Kota Tanpa Kumuh. Modifikasi terhadap *Rapfish* semacam itu telah

dilakukan di sejumlah penelitian dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan. Riset keberlanjutan industri kreatif di sektor ekonomi (Ibrahim, Amanah, Gani, & Purnaningsih, 2013), keberlanjutan program pemerintah (Suryawati & Purnomo, 2017), dan keberlanjutan kebijakan pertanian kota (Sampeliling, Sitorus, Nurisyah, & Pramudya, 2012) merupakan sejumlah riset yang memodifikasi *Rapfish* untuk mengukur keberlanjutan di luar sektor perikanan. Penelitian ini memodifikasi *Rapfish* untuk mengukur keberlanjutan program KOTAKU di Kelurahan Bareng melalui penyebaran kuesioner. Modifikasi terutama akan dilakukan dalam menentukan atribut dan indikator keberlanjutan (Tabel 1).

**Tabel 1.** Variabel dan Indikator Pengukuran

No.	Variabel	Indikator
1.	Bangunan Gedung	Ketidakteraturan dalam hal dimensi, orientasi, dan bentuk. Kepadatan tinggi tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang. Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis sistem struktur, pengamanan petir, penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan bahan bangunan.
2.	Jalan Lingkungan	Kondisi permukaan jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan dengan aman dan nyaman. Lebar jalan yang tidak memadai. Kelengkapan jalan yang tidak memadai.
3.	Penyediaan Air Minum	Ketidakterediaan akses air minum. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu. Tidak terpenuhinya kualitas air minum sesuai standar kesehatan.
4.	Drainase Lingkungan	Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan. Menimbulkan bau. Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan.
5.	Pengelolaan Air Limbah	Ketidakterediaan sistem pengelolaan air limbah. Ketidakterediaan kualitas buangan sesuai standar yang berlaku. Tercemarnya lingkungan sekitar.

No.	Variabel	Indikator
6.	Pengelolaan Persampahan	Ketidakterediaan sistem pengelolaan persampahan.
		Ketidakterediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.
		Tercemarnya lingkungan sekitar oleh sampah.
7.	Pengamanan Kebakaran	Ketidakterediaan sistem pengamanan secara aktif dan pasif.
		Ketidakterediaan pasokan air untuk pemadaman yang memadai.
		Ketidakterediaan akses untuk mobil pemadam kebakaran.

Sumber: Kementerian PUPR (2015)

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga Kelurahan Bareng. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kelurahan Bareng pada tahun 2018 sebanyak 13.937 jiwa. Sampel dari populasi tersebut dihitung menggunakan Rumus Slovin. Berdasarkan data populasi warga Kelurahan Bareng, maka dilakukan perhitungan sampel proporsional dengan Rumus Slovin sebanyak 100 sampel.

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *simple random sampling*. Teknik itu memungkinkan semua anggota populasi terpilih menjadi sampel penelitian. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan homogenitas dari populasi yang sedang dipelajari. Homogenitas dalam penelitian ini mengacu kepada kesamaan anggota populasi sebagai warga Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang.

Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini berbentuk kuantitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini menempati kedudukan sebagai data primer. Peneliti mengumpulkan data dalam bentuk angka secara langsung dari sampel penelitian untuk melakukan pengukuran terhadap keberlanjutan program KOTAKU di Kelurahan Bareng. Data tersebut dikumpulkan secara langsung dari responden yang terpilih secara acak. Selain mengumpulkan informasi secara langsung, penelitian ini juga akan mengumpulkan data

sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari telaah literatur, profil kelurahan, data BPS, dan media massa. Data sekunder tersebut digunakan sebagai informasi tambahan dalam melakukan interpretasi atas data primer yang diperoleh secara langsung dari responden penelitian.

Tahapan analisa data yang dilakukan peneliti yaitu, *Pertama* Peneliti mengukur konsep-konsep dan atribut yang relevan dengan keberlanjutan program KOTAKU di Kelurahan Bareng menggunakan Skala Likert. *Kedua*, data dikumpulkan berdasarkan konsep-konsep yang telah ditentukan, antara lain bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, pengamanan kebakaran, dan ruang terbuka publik. *Ketiga*, data statistik yang telah terkumpul akan diolah menggunakan perangkat lunak *Rapfish* untuk memperoleh indeks keberlanjutan. *Keempat*, indeks keberlanjutan dimasukkan dalam kategori baik, cukup atau buruk. *Kelima* data yang telah muncul dilakukan intepretasi untuk menjawab pertanyaan 'mengapa' dalam keberlanjutan program Kotaku di Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen Kota Malang.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah program pemerintah guna mendukung pemenuhan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019. Sejalan dengan itu, peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan pemukiman. Beberapa penelitian terkait program KOTAKU sebenarnya telah banyak ditelusuri oleh beberapa peneliti. *Yuliani dan Rosyida (2017)* misalnya, keduanya melakukan penelitian terkait kolaborasi dalam perencanaan program Kota Tanpa Kumuh di kelurahan Semanggi, Kota Surakarta dan memaparkan bahwa kolaborasi multi pihak belum diimplementasikan dalam perencanaan program KOTAKU di Kelurahan tersebut karena minimnya keterlibatan *stakeholder* dalam tiap tahapnya. Selain itu, keduanya juga menemukan adanya

hambatan kerjasama dalam bentuk sumber daya manusia serta kendala komunikasi antara masing-masing *stakeholder* sehingga belum ada kolaborasi yang efektif dan masih memerlukan persamaan persepsi tentang konsep kolaborasi multi pihak (Yuliani & Rosyida, 2017). Berbicara mengenai implementasi program, Christianingrum dan Djumiarti (2019) menjelaskan terkait implementasi program KOTAKU di Kecamatan Semarang Timur. Keduanya menemukan bahwa terdapat lima program yang dijalankan, yaitu perbaikan kondisi bangunan gedung, perbaikan jalan lingkungan, penyediaan air minum, pemberian fasilitas pengelolaan sampah, dan penyediaan proteksi kebakaran. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya penurunan luas kawasan pemukiman kumuh dari 415,83 Ha menjadi 118,5 Ha. Implementasi program KOTAKU ini menurut keduanya memiliki faktor penghambat, yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait program, dan kurangnya partisipasi masyarakat di dalam proses pembangunan (Christianingrum & Djumiarti, 2019). Kesimpulan dari penelitian keduanya adalah berjalannya implementasi KOTAKU di Kecamatan Semarang Timur sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan terdapat capaian penurunan luas pemukiman kumuh dari 71,5%. Berdasarkan penelitian di atas, kajian terkait kolaborasi multi pihak dan implementasi program KOTAKU dapat dikatakan cukup signifikan dalam memberikan kontribusi teoritis maupun praktis atas berjalannya sebuah program untuk mengurangi jumlah pemukiman kumuh. Namun demikian, pentingnya proses keberlanjutan kurang begitu disorot oleh penelitian sebelumnya. Sehingga, peneliti tertarik untuk menelusuri dan merumuskan indeks keberlanjutan program KOTAKU di Kota Malang.

Arah kebijakan pembangunan Dirjen Cipta Karya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah, dan memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas). Program KOTAKU akan menangani permasalahan kota kumuh dengan membangun *platform* kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat (Kementerian PUPR, 2015).

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kumuh yang ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing

kabupaten/kota, permukiman kumuh yang berada di lokasi sasaran Program KOTAKU adalah seluas 23.656 Hektar. Sebagai implementasi percepatan penanganan kumuh, Program Kotaku melakukan peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru, dengan kegiatan-kegiatan pada entitas desa/kelurahan, serta kawasan dan kabupaten/kota. Kegiatan penanganan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh (Nurhasanah, 2019).

Tahapan pelaksanaan Program KOTAKU adalah pendataan. Lembaga masyarakat di desa/kelurahan yang bernama Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) sudah melakukan pendataan kondisi awal (*baseline*) 7 Indikator Kumuh di desa/kelurahan masing-masing. Data tersebut diintergrasikan antara dokumen perencanaan masyarakat dan dokumen perencanaan kabupaten/kota untuk menentukan kegiatan prioritas mengurangi permukiman kumuh dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru. Yang nantinya akan dilaksanakan, baik oleh masyarakat atau oleh pihak lain, yang memiliki keahlian dalam pembangunan infrastruktur pada entitas kawasan dan kota (Kementerian PUPR, 2015).

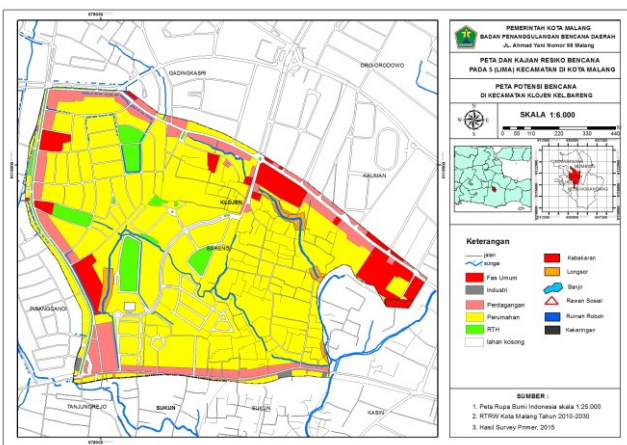
*Monitoring* dan evaluasi akan dilakukan secara berkala guna memastikan ketepatan kualitas dan sasaran kegiatan, sehingga dapat membantu percepatan penanganan permukiman kumuh. Kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas untuk pemerintah daerah dan masyarakat akan dilakukan bersama tahapan kegiatan. Termasuk mendorong perubahan perilaku dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar permukiman (Yuliani & Rosyida, 2017).

Program KOTAKU telah disosialisasikan kepada pemerintah daerah pada 27 April 2016 bertempat di Jakarta. Badan Keswadayaan Masyarakat akan menjadi faktor yang dapat mempercepat tercapainya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan karena sudah berpengalaman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan



penanggulangan kemiskinan. BKM ini “direvitalisasi” dari sebelumnya yang terfokus pada penanggulangan kemiskinan, kini berorientasi ke penanganan kumuh. Sifat dan skala kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman, berpotensi menimbulkan dampak pada lingkungan dan dampak sosial yang merugikan. Oleh karena itu dalam Program KOTAKU setiap usulan kegiatan pembangunan yang memiliki dampak lingkungan harus dilengkapi dengan rencana pengelolaan lingkungan sebagai langkah mitigasi dampak (Undang-undang No. 23 Tahun 2009 ).

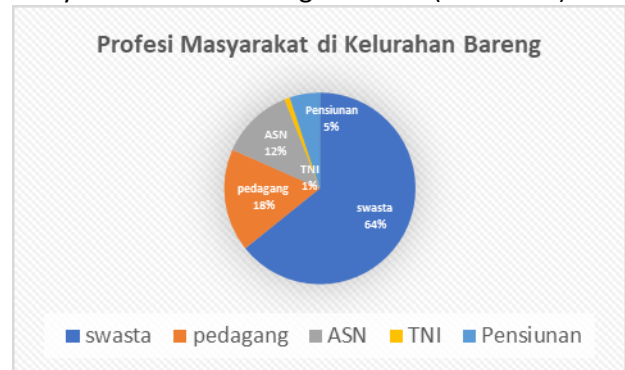
Kelurahan Bareng merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Klojen, Kota Malang. Batas wilayah Kelurahan Bareng di sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen; Di Utara dengan Kelurahan Gading Kasri, dan Kecamatan Klojen; Pada bagian barat bersebelahan dengan Kelurahan Pisang Candi dan Kecamatan Sukun serta bagian selatan dengan Kelurahan Tanjungrejo dan Kecamatan Sukun (lihat Gambar 1). Kelurahan Bareng memiliki luas wilayah 10,650 km<sup>2</sup> dengan ketinggian mencapai 4,44 mdpl, dengan luas wilayah tersebut di Kelurahan Bareng terdapat warga dengan jumlah 13.937 yang tersebar di berbagai RT yang ada di kelurahan ini, untuk jumlah RT di Kelurahan Bareng ada 74 RT dengan 8 RW. Kelurahan Bareng memiliki suhu yang cukup sejuk berkisar antara 18°C-30°C.



**Gambar 1.** Peta Administratif dan Peta Kerawanan Bencana di Kelurahan Bareng

Sumber : <https://opendata.malangkota.go.id/data/klojen>

Dan diketahui sebaran jumlah dan profesi masyarakat adalah sebagai berikut (Gambar 2):



**Gambar 2.** Diagram Profesi Masyarakat Kelurahan Bareng

Sumber: <https://kelbareng.malangkota.go.id/profil/SistemInformasiKelurahanBareng>

Gambaran demografis responden penelitian menunjukkan usia responden yang variatif baik dari yang masih berusia muda hingga yang sudah lanjut usia. Masyarakat Kelurahan Bareng yang menjadi responden memiliki rentang usia dari 17 tahun hingga 30 tahun sebanyak 77 responden, rentang usia 31 hingga 44 tahun sebanyak 9 responden, rentang usia 45 hingga 58 tahun sebanyak 13 responden, dan rentang usia 49 sampai 72 tahun sebanyak 1 responden. Rentang usia 17 hingga 30 tahun memiliki persentase yang paling banyak diantara usia yang lainnya, hal ini dikarenakan ketika melakukan penelitian kepada masyarakat Kelurahan Bareng usia 17 hingga 30 tahun lebih sering peneliti temui (lihat Tabel 2).

**Tabel 2.** Umur Responden n = 100

Umur Responden	Frequency	Percent (%)
17 – 30	77	77,0
31 – 44	9	9,0
45 – 58	13	13,0
59 – 72	1	1,0

Dari 100 responden, sebanyak 57 responden berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 57%, dan 43 responden peneliti yang berjenis kelamin perempuan dengan persentase 43% (lihat Tabel 3). Selain itu pemilihan responden dalam penelitian bersifat acak, jadi siapapun penduduk Kelurahan Bareng yang ditemui dan bersedia dapat menjadi responden dalam penelitian.

**Tabel 3.** Jenis Kelamin Responden n = 100

	Frequency	Percent (%)
Laki-laki	57	57,0
Perempuan	43	43,0
Total	100	100,0

Informasi yang diperoleh dari 100 responden yang telah mengisi kuesioner diketahui bahwa pekerjaan masyarakat Kelurahan Bareng sangat beragam. Dari 100 responden 47 responden atau 47% atau yang paling banyak diantara yang lain yakni responden yang menjadi mahasiswa (lihat Tabel 4).

**Tabel 4.** Pekerjaan Responden n = 100

	Frequency	Percent (%)
Aparatur Sipil Negara (ASN)	1	1,0
Barista	2	2,0
Belum Bekerja	1	1,0
Buruh Harian	1	1,0
Driver Ojek Online	1	1,0
Freelance	1	1,0
Fresh Graduated	1	1,0
Guru	3	3,0
Guru Les	1	1,0
Ibu Rumah Tangga	6	6,0
Karyawan	1	1,0
Karyawan Percetakan	1	1,0
Karyawan Swasta	3	3,0
Kuangan	1	1,0
Konveksi	1	1,0
Kurir	1	1,0
Mahasiswa	47	47,0
Pegawai Swasta	1	1,0
Pelajar	8	8,0
Penjahit	1	1,0
Perawat	1	1,0
Swasta	3	3,0
Wiraswasta	8	8,0
Wirausaha	4	4,0
Total	100	100,0

Dari data yang sudah diperoleh dari 100 responden penelitian, diketahui bahwa pendidikan terakhir

responden dari 100 responden 74 responden atau 74% memiliki pendidikan terakhir hingga jenjang SMA/SMK (lihat Tabel 5).

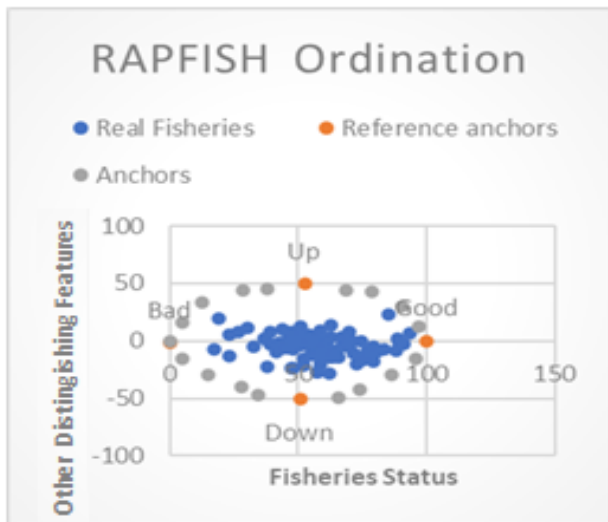
**Tabel 5.** Pendidikan Terakhir Responden n = 100

	Frequency	Percent (%)
SD	1	1,0
SMP	4	4,0
SMA/SMK	74	74,0
Diploma	4	4,0
S1	17	17,0
Total	100	100,0

Analisa indeks keberlanjutan program dalam penelitian ini dibantu oleh *software Raphfish*. Dengan bantuan perangkat lunak ini diperoleh indeks-indeks keberlanjutan untuk perumahan, fasilitas umum, lingkungan, ruang publik dan indeks dari perhitungan ke semua dimensi menjadi indeks keberlanjutan program.

Dimensi perumahan dalam hal ini dihitung dengan mempertimbangkan 10 atribut yaitu sanitasi, pencahayaan, sirkulasi udara, pengaman petir, bahan dan sistem bangunan, penerapan tata ruang, kepadatan bangunan, orientasi bangunan, keteraturan dimensi dan keteraturan bangunan. Sehingga terlihat persebaran jawaban responden dalam Gambar 3.

Dari Gambar 3 dapat diketahui bahwa sebaran responden berada pada bulatan biru yang menyebar diantara nilai 20 hingga 80 dengan banyak titik yang berkumpul pada interval angka 40-60, dimana dengan perhitungan melalui *software rapfish* diperoleh indeks yang didapat pada keberlanjutan perumahan sebesar 57.4125964. Setelahnya, memasukan kategorisasi indeks tersebut berdasarkan indeks analisis *Rapfish* (lihat Tabel 6).



**Gambar 3.** Matriks Sebaran Jawaban Responden Dimensi Perumahan

**Tabel 6.** Nilai Indeks *Rapfish*

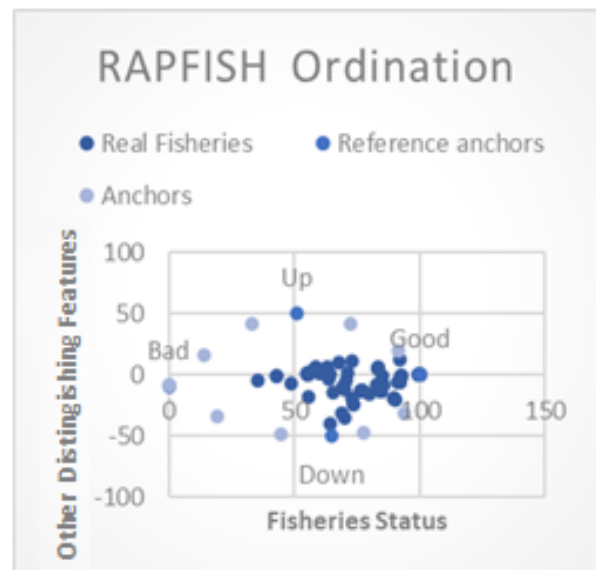
Indeks	Kategori
$\leq 24.9$	Buruk
25-49.9	Kurang Berkelanjutan
50-74.9	Cukup Berkelanjutan
$>75$	Baik

Sumber : Fauzi & Anna, 2005 dalam Mahida & Permana, 2019

Berdasarkan Tabel 6, diketahui bahwa indeks 57.4125964 masuk dalam kategori cukup berkelanjutan artinya program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam dimensi perumahan disimpulkan dalam kategori cukup berkelanjutan. Dalam kategori ini program KOTAKU bisa jadi berlanjut di masa datang dengan penilaian kurang begitu baik namun juga tidak buruk. Program KOTAKU dalam dimensi perumahan dapat berjalan dengan beberapa kondisi yang perlu diperhatikan agar keberlanjutan program ini tetap ada.

Untuk mengetahui apa yang paling berpengaruh dalam dimensi perumahan ini, digunakan *Leverage test* untuk mengetahui faktor pengungkit paling berpengaruh terhadap peningkatan atau penurunan indeks keberlanjutan. Atribut yang paling mempengaruhi adalah penerapan tata ruang sebesar 3.929710642. Penerapan perencanaan tata ruang di lingkungan tempat tinggal menjadi faktor yang paling menaikkan atau menurunkan indeks pada dimensi perumahan.

Dimensi fasilitas umum mempertimbangkan 6 hal yaitu kualitas air minum, terpenuhinya air minum, akses jalan, kelengkapan jalan, lebar jalan dan permukaan jalan. Indikator ini berfokus pada infrastruktur penyediaan air bersih dan sarana transportasi, lebih khususnya pada jalan. Dengan Analisa *software Rapfish* diperoleh persebaran data pada Gambar 4.



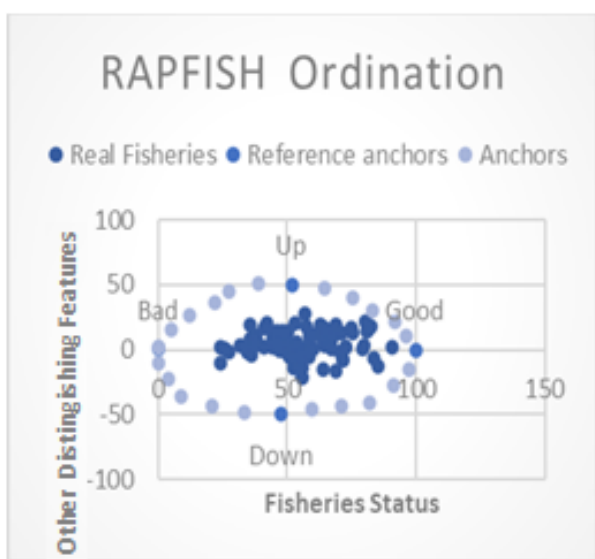
**Gambar 4.** Matrik Sebaran Data responden Dimensi Fasilitas Umum

Seperti yang tampak pada grafik Gambar 4, *rapfish coordination* menunjukkan rentang 0 hingga 100 pada garis horizontal. Kemudian, sebaran jawaban berada pada rentang 40-80. Dalam perhitungan lebih lanjut, indeks pada rentang tersebut menunjukkan angka 78.6048. Berdasarkan intepretasi indeks *rapfish*, angka tersebut menunjukkan indeks cukup berlanjut. Faktor yang paling mempengaruhi untuk dimensi fasilitas umum adalah kondisi jalan.

Untuk Dimensi lingkungan, peneliti memilih 12 atribut yang mempengaruhi baik buruknya keberlanjutan yaitu akses jalan mobil pemadam kebakaran, ketersediaan air pemadam, kondisi alat pengaman kebakaran, kebersihan sampah, sarana prasarana sampah, kondisi pengolahan sampah, kondisi lingkungan, kualitas buangan air, pengelolaan air limbah, akses drainase, kondisi drainase dan kebersihan drainase. Analisa *rapfish coordination* dapat dilihat pada Gambar 5.



Sebaran data pada grafik Gambar 5 menunjukkan pada *range* angka 40-80. Berdasarkan hasil perhitungan *rapfish* diketahui bahwa pada dimensi ini menunjukkan indeks 54.9326. Berdasarkan pengkategorian indeks *rapfish*, angka tersebut masuk dalam kategori keberlanjutan yang cukup. Faktor yang mempengaruhi mengapa dimensi lingkungan masuk kategori cukup berlanjut karena atribut tertinggi adalah kondisi alat pengaman kebakaran sebesar 3.502747073. Hal ini diartikan jika faktor yang paling banyak mempengaruhi jika dimensi lingkungan cukup adalah kondisi alat pengaman kebakaran.

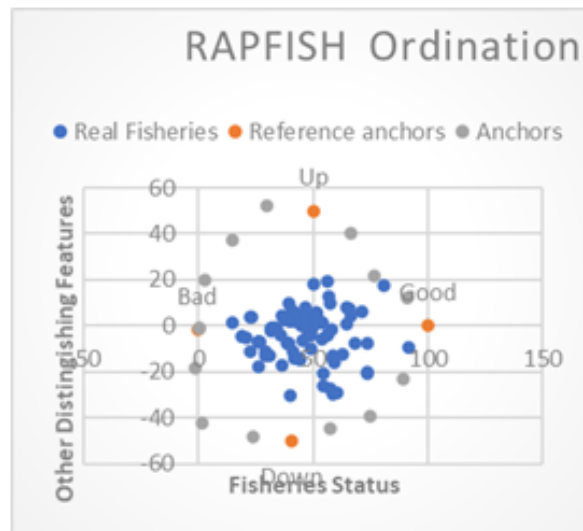


Gambar 5. Matrix sebaran Data Responden Dimensi Lingkungan

Dalam Analisa dimensi ruang publik, peneliti memilih 8 atribut penilaian yaitu stasiun, halte, jalan, pertokoan, pasar, *playground*, ruang komunitas dan ruang terbuka hijau (RTH). Delapan indikator tersebut mewakili ruang publik, tempat manusia berinteraksi dan pusat segala aktivitasnya. Hasil Analisa *rapfish* muncul dalam grafik Gambar 6.

Dari grafik Gambar 6 dapat dilihat persebaran data yang berada di rentang 20 hingga 60. Berdasarkan hasil perhitungan *rapfish*, diketahui bahwa pada rentang tersebut didapat indeks yang muncul yaitu sebesar 45.74662. Artinya indeks keberlanjutan ruang publik berada dalam kategori kurang berlanjut. Faktor penguangkit yang paling dominan dalam membentuk dimensi ruang publik ini adalah

indikator jalan sebesar 7,774578905. Jalan menjadi faktor yang paling besar mempengaruhi dimensi ruang hidup dan ruang komunitas dan ruang terbuka hijau (RTH) menjadi dimensi yang terkecil dan butuh dilakukan pembangunan ke depannya.



Gambar 6. Matrix sebaran Data Dimensi Ruang Publik

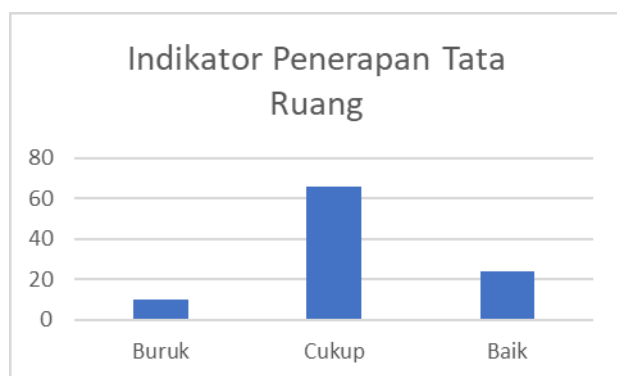
Indeks keberlanjutan masuk dalam kategori 'cukup' pada program KOTAKU di Kelurahan Bareng menunjukkan hasil yang kurang lebih sama pada implementasi program yang sama pada kota-kota lain di Indonesia. Pada kasus di kota-kota lain dalam implementasi KOTAKU terdapat beberapa kekurangan dari program tersebut. Merujuk pada penelitian yang dilakukan Yuliani dan Rosyida (2017) yang menunjukkan bahwa kolaborasi masyarakat dirasa belum diimplementasikan pada program KOTAKU. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam penelitian Christianingrum dan Djumiarti (2019) yang menyebutkan bahwa program KOTAKU kurang sosialisasi dari pemerintah sehingga partisipasi masyarakat menjadi kurang.

Sama halnya dengan penelitian pada kali ini, indeks keberlanjutan program KOTAKU dikatakan cukup karena ada dimensi yang memiliki indeks terendah atau kurang yaitu pada dimensi ruang publik dan diikuti dimensi lingkungan dan perumahan pada kategori cukup dan terakhir pada dimensi fasilitas umum masuk dalam kategori baik. Adanya 3 dimensi yang diidentifikasi berkisar kurang hingga cukup, membuat hasil akhir dari perhitungan indeks keberlanjutan ini pada kategori cukup (lihat Tabel 7).

Tabel 7. Hasil Perhitungan *Rapfish*

No.	Dimensi	Indeks	Kategori
1	Perumahan	57.4125964	Cukup
2	Fasilitas Umum	78.6046	Baik
3	Lingkungan	54.9326	Cukup
4	Ruang Publik	45.74662	Kurang
<b>5</b>	<b>Indeks Keseluruhan</b>	<b>59.1741</b>	<b>Cukup</b>

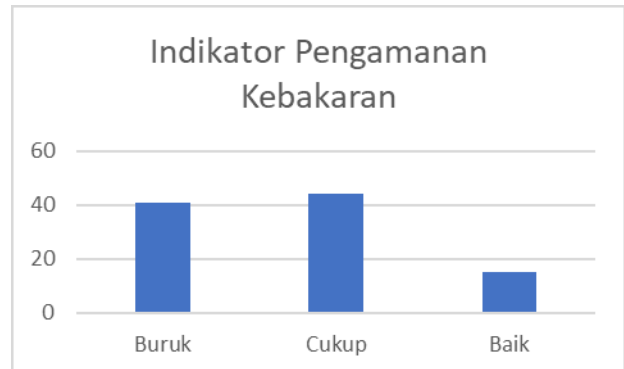
Secara umum dapat diketahui jika Indeks keseluruhan dalam kategori cukup dikarenakan ada aspek yang rendah hingga kurang yaitu perumahan, lingkungan, dan ruang publik. Pada aspek perumahan beberapa hal yang dijadikan indikator pengukuran adalah ketidakteraturan dalam hal dimensi, orientasi dan bentuk, tingkat kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknik seperti sistem struktur, pengamanan petir, penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan bahan bangunan. Dengan analisa deskriptif diketahui jika hasil survai menunjukkan kategori cukup.



**Gambar 7.** Diagram Indikator Penerapan Tata Ruang n = 100

Dari pengolahan data seluruh item pertanyaan dalam indikator bangunan gedung termasuk di dalamnya penerapan tata ruang, mayoritas responden menjawab cukup (lihat Gambar 7). Untuk dimensi lingkungan mengapa termasuk dalam kategori cukup dikarenakan kondisi alat

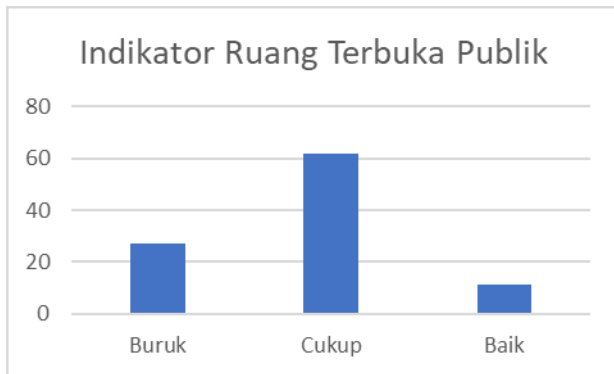
pemadam kebakaran dalam kategori cukup (lihat Gambar 8).



**Gambar 8.** Diagram Indikator Penerapan Tata Ruang n = 100

Seperti diketahui jika akses jalan mobil pemadam kebakaran, ketersediaan air pemadam dan kondisi alat pengaman kebakaran menjadi indikator dari lingkungan. Berdasarkan data Gambar 8, dari indikator pengamanan kebakaran dari 100 responden peneliti yang merupakan warga Kelurahan Bareng sebanyak 41 responden atau setara dengan 41% memberikan jawaban yang merepresentasikan jika pengamanan kebakaran yang ada di Kelurahan Bareng tergolong ke kategori buruk, selanjutnya 44 responden dengan persentase 44% merepresentasikan jawaban bahwa pada indikator pengamanan kebakaran di Kelurahan Bareng tergolong ke kategori cukup, dan untuk sisanya, sebanyak 15 responden dengan persentase 15% merepresentasikan jawaban yang menyatakan jika untuk pengamanan kebakaran di Kelurahan Bareng tergolong ke kategori baik. Dari data pada Gambar 8 dan data deskripsi yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa untuk pengamanan kebakaran di Kelurahan Bareng masih tergolong buruk hingga cukup, hal ini menandakan jika indeks keberhasilan program KOTAKU di Kelurahan Bareng pada indikator pengamanan kebakaran masih kurang memuaskan.

Dalam Analisa dimensi ruang publik mengapa mendapati nilai kurang dikarenakan karena pada aspek ketersediaan ruang terbuka hijau dan juga ruang terbuka publik mendapati nilai pada kategori cukup (lihat Gambar 9).



**Gambar 9.** Diagram Indikator Ruang Terbuka Publik  
n = 100

Dari data yang ada pada Gambar 9 diketahui bahwa untuk indikator ruang terbuka publik yang ada di Kelurahan Bareng tergolong ke kategori cukup. Terbukti dari 100 responden peneliti yang telah mengisi kuesioner yang peneliti sebar mendapatkan data sebagai berikut. Dari 100 responden sebanyak 27 responden atau setara dengan 27% memberikan jawaban yang memberi representasi jika untuk ruang terbuka publik yang ada di Kelurahan Bareng tergolong buruk, selanjutnya 62 responden dengan persentase 62% merepresentasikan jawaban pada indikator ruang terbuka publik di Kelurahan Bareng tergolong ke kategori cukup, dan yang terakhir sebanyak 11 responden dengan persentase 11% merepresentasikan jawaban responden yang menyatakan jika ruang terbuka publik di Kelurahan Bareng tergolong ke kategori baik.

Dari data yang telah dipaparkan dan pula telah dianalisa secara deskripsi dapat kita ketahui jika keberhasilan program KOTAKU dalam indikator ruang terbuka publik yang berada di Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen tergolong ke kategori cukup. Data tersebut diperoleh peneliti dari jawaban 100 responden terhadap pertanyaan indikator ruang terbuka publik yang telah sebar dan diisi oleh 100 responden warga Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen. Pertanyaan tersebut meliputi: ketersediaan lahan terbuka hijau (sawah, kebun, lapangan dan taman kota) di Kelurahan Bareng, ketersediaan ruang komunitas, ketersediaan tempat bermain (*playground*), ketersediaan pasar, ketersediaan plaza/pertokoan, ketersediaan jalan, ketersediaan halte, dan ketersediaan fasilitas transportasi umum (stasiun, terminal, dll) di Kelurahan Bareng. Ruang terbuka

publik penting bagi kehidupan di suatu wilayah, tidak terkecuali untuk Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang karena ruang terbuka publik memiliki peranan di tengah kehidupan masyarakat perkotaan, oleh karenanya tentu sangat diperlukan keberadaan ruang terbuka publik ditengah kehidupan masyarakat. Ruang terbuka publik sendiri merupakan tempat yang secara sengaja disediakan oleh pemerintah untuk dinikmati oleh warganya secara gratis.

Hal itu tidak dapat dipungkiri hingga sekarang, ketika muncul proses pembangunan perkotaan di Indonesia. Termasuk pada wilayah lokasi penelitian, dimana program perkotaan tersebut dinilai sebagai program yang cukup berlanjut. Program KOTAKU dinyatakan sebagai program yang tidak terlalu kuat dalam menyelesaikan permasalahan pada wilayah *urban-village* (kota-desa) yang ada di kota Malang. Hal ini terbukti dengan skala keberlanjutan yang berhenti pada kategori cukup. Wilayah ini nampaknya menyisakan berbagai hal dalam perkembangan perkotaannya terutama pada tata ruang, ruang publik, dan aspek lingkungan pada fasilitas pengaman kebakaran. Berdasarkan analisa sejarah kota di Indonesia, Pada wilayah penelitian, diketahui bahwa pemerintah sudah berupaya dengan sebaik mungkin dalam menangani permasalahan wilayah kumuh, namun ada beberapa kendala yang dihadapi sehingga program ini memiliki keberlanjutan cukup. Kendala itu bisa jadi dari sisi aktor yaitu pada partisipasi masyarakat atau pengelolaan program KOTAKU, pada sisi aktivitas/programnya seperti seberapa jauh program tersebut mampu menjawab permasalahan masyarakat kota dan pada sisi tempat, apakah tempat dilaksanakannya tersebut merupakan tempat yang tepat untuk dilakukan program yang tepat pula.

Dimensi perumahan menjadi dimensi yang cukup menyumbang indeks keseluruhan program KOTAKU menjadi cukup. Dimensi perumahan ini mengukur 10 aspek yang terdiri dari sanitasi, pencahayaan, sirkulasi udara, pengaman petir, bahan dan sistem bangunan, penerapan tata ruangan, kepadatan bangunan, orientasi bangunan, keteraturan dimensi dan keteraturan bangunan dimana bagian penerapan tata ruang

yang paling banyak mempengaruhi turun atau naiknya indeks. Dapat diketahui jika hampir 60% lebih dari responden menyatakan jika bangunan gedung dalam kategori cukup. Hal ini termasuk lokasi tempat tinggal mereka kepadatannya cukup tinggi diiringi pula pola tata ruang yang cukup. Hal ini sebenarnya memperlihatkan bahwa penataan lingkungan di sekitar lokasi tempat tinggal tidak maksimal. Kondisi tempat tinggal warga kota menjadi indikator penting untuk melihat pola-pola penataan kota-kota di Indonesia.

Pada negara berkembang, tempat tinggal menjadi permasalahan karena berkembangnya kota diiringi bertambahnya jumlah penduduk yang semakin banyak juga mengakibatkan kebutuhan tempat tinggal mutlak harus dipenuhi. Di sisi lain, semakin banyak permintaan mengakibatkan kekurangan pada ketersediaan rumah tinggal (Gottdiener, Budd, & Lehtovuori, 2015). Lebih lanjut, permasalahan tempat tinggal ini juga muncul pada kualitasnya yaitu pada tempat tinggal yang tidak memenuhi standar seperti lokasi tempat tinggal yang *overcrowding* (padat) dan unit yang dibangun tidak sesuai dengan peraturan lokal (Gottdiener dkk., 2015). Hal ini bisa jadi sesuai dengan kondisi di masyarakat pada lokasi penelitian. Dimensi perumahan dinilai cukup oleh mereka dikarenakan rencana tata ruang yang tidak terlalu baik yang dapat pula diasumsikan rencana tata ruang tidak sesuai atau kurang sesuai dengan rencana penetapan ruang dan juga adanya kepadatan penduduk, meskipun tingkatnya cukup.

Dimensi lingkungan mengukur akses jalan mobil pemadam kebakaran, ketersediaan air pemadam, kondisi alat pengaman kebakaran, kebersihan sampah, sarana prasarana sampah, kondisi pengolahan sampah, kondisi lingkungan, kualitas buangan air, pengelolaan air limbah, akses drainase, kondisi drainase dan kebersihan drainase. Dalam perhitungannya, dimensi lingkungan mendapatkan kategori cukup. Hal ini sebetulnya menjadi hal yang umum terjadi ketika lingkungan menjadi dikorbankan seiring dengan perkembangan wilayah dan meningkatnya jumlah penduduk baik di negara maju maupun negara berkembang. Pada wilayah-wilayah perkotaan terdapat berbagai permasalahan berkaitan

lingkungan yang disebabkan oleh infrastruktur dan lembaga sosial yang kurang memadai dalam merespon pertumbuhan kota. Lebih lanjut, permasalahan lingkungan di perkotaan yang kerap terjadi, seperti kemacetan, polusi air dan sampah adalah konsekuensi dari pembangunan yang cepat serta jumlah penduduk yang padat (Gottdiener dkk., 2015). Hal ini terlihat pada lokasi penelitian, dimana seiring dengan pertumbuhan kota dan juga padatnya jumlah penduduk, mengakibatkan muncul permasalahan lingkungan. Lingkungan dalam hal ini spesifik pada kondisi alat pengaman kebakaran. Masyarakat merasa jika pada aspek tersebut dinilai cukup dikarenakan bisa jadi infrastruktur dan lembaga sosial yang melakukan penataan mengenai aspek tersebut belum cukup memuaskan masyarakat.

Pada dimensi terakhir yaitu dimensi ruang publik, diketahui jika hasil perhitungan menunjukkan kategori kurang. Atribut yang ada dalam dimensi ruang publik ini ruang komunitas dan ruang terbuka hijau (RTH). Keberadaan ruang publik dirasa masih memiliki banyak kekurangan bagi masyarakat. Ruang-ruang publik yang dihadirkan pada ruang perkotaan sebenarnya dipengaruhi oleh aspek budaya, politik, sosial dan ekonomi dimana lebih lanjut hal ini dinamakan *social-spatial approach* dalam memahami ruang pada kota (Gottdiener dkk., 2015). Masyarakat merasakan sektor ruang publik ini kurang dikarenakan ruang publik yang dihadirkan belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif *social-spatial approach*, hubungan masyarakat dengan ruang (*space*) ini juga diartikan bagaimana seseorang yang hidup di perkotaan memaknai simbol-simbol pada objek material pada lingkungan terbangun di perkotaan. Lebih lanjut, hal inilah yang disebut dengan *urban semiotic*, yaitu studi mengenai makna individu/kelompok terhadap keberadaan simbol atau objek yang ada di wilayah perkotaan (Gottdiener, Hohle, & King, 2019). Masyarakat sebagian besar menjawab kurang pada fasilitas publik karena memiliki makna jika fasilitas publik yang baik adalah fasilitas yang mampu memenuhi kebutuhan mereka, nyatanya pada fasilitas jalan dan pasar, menjadi simbol/objek yang dimaknai kurang oleh mereka. Makna ini muncul dari pengalaman sehari-hari

yang dirasakan, kesadaran dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat.

#### 4. KESIMPULAN

Indeks keberlanjutan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Bareng Kota Malang yaitu 59.174. Hal ini diartikan bahwa keberlanjutan program ini masuk dalam kategori cukup. Kategori ini mengindikasikan bahwa program KOTAKU dapat dikatakan tidak terlalu berjalan dengan baik namun juga tidak terlalu berjalan buruk/tidak baik. Jika program KOTAKU akan dilanjutkan ke depan, program tersebut membutuhkan beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu pada dimensi perumahan, lingkungan dan ruang publik. Secara lebih spesifik lagi, hal yang dapat menjadi perhatian pada dimensi perumahan adalah penerapan tata ruang, pada dimensi lingkungan adalah kondisi alat pengaman kebakaran dan pada dimensi ruang publik adalah ruang terbuka hijau dan ruang komunitas.

Penelitian ini menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan perkotaan kedepan bagi pemangku terkait untuk lebih memperhatikan aspek di dalamnya yaitu perumahan, lingkungan dan ruang publik, dimana pada dimensi perumahan perlu dilihat kembali penerapan tata ruang seperti keteraturan dalam dimensi, bentuk dan orientasi gedung, tingkat kepadatan serta persyaratan teknis bangunan. Pada dimensi lingkungan perlu ditelaah kembali mengenai fasilitas infrastruktur pengaman kebakaran sedangkan pada dimensi ruang publik perlu dikembangkan kembali ruang terbuka hijau dan juga ruang terbuka publik.

Bagi penelitian selanjutnya, penggunaan *rapfish software* dalam analisa data ini berguna untuk menganalisa secara kuantitatif. Dibutuhkan penggalian data lain secara kualitatif, misal dengan melakukan wawancara untuk menganalisa secara mendalam dan menginterpretasi hasil perhitungan kuantitatif dari *rapfish software*.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

Alfiani, K. (2018). *Peran Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Penanganan Pemukiman Kumuh melalui Program*

*KOTAKU (Studi di Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang)* (Doctoral Dissertation), Universitas Brawijaya.

Cahyani, W. N. (2019). *Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Peningkatan Kualitas Hidup (Studi di Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang)*. (Skripsi), University of Muhammadiyah Malang.

Christianingrum, S. I., & Djumiarti, T. (2019). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Semarang Timur. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 88-105. Doi: <https://doi.org/10.14710/jppmr.v8i2.23515>

Cresswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gottdiener, M., Budd, L., & Lehtovuori, P. (2015). *Key Concepts in Urban Studies*. London: Sage.

Gottdiener, M., Hohle, R., & King, C. (2019). *The New Urban Sociology* (6th Edition ed.). New York: Routledge. Doi: <https://doi.org/10.4324/9780429244452>

Ibrahim, H., Amanah, S., Gani, D. S., & Purnaningsih, N. (2013). Analisis Keberlanjutan Usaha Pengrajin Ekonomi Kreatif Kerajinan Sutra di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 23(3), 210-219. Doi: <https://doi.org/10.3724/SP.J.1077.2013.13190>

Kementerian PUPR. (2015). *Sekilas Informasi KOTAKU Kota Tanpa Kumuh*. KOTAKU Kota Tanpa Kumuh.

Keputusan Walikota Pemerintah Kota Malang Nomor 188.45/86/35.73.112/2015 Tentang Penetapan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh.

Neuman, L. W. (2007). *Basic of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*. India: Pearson Education, Inc.

Nurhasanah, N. (2019). Implementasi Kebijakan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)*, 1(1), 58-70. Doi: <http://dx.doi.org/10.33474/jisop.v1i1.2672>



- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
- Pitcher, T. J., & Preikshot, D. (2001). RAPFISH: A Rapid Appraisal Technique to Evaluate The Sustainability Status of Fisheries. *Fisheries Research*, 49(3), 255-270. Doi: [https://doi.org/10.1016/S0165-7836\(00\)00205-8](https://doi.org/10.1016/S0165-7836(00)00205-8)
- Sampeliling, S., Sitorus, S. R., Nurisyah, S., & Pramudya, B. (2012). Kebijakan Pengembangan Pertanian Kota Berkelanjutan: Studi Kasus di DKI Jakarta. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 10(3), 257-267. Doi: 10.21082/akp.v10n3.2012.257-267
- Suryawati, S. H., & Purnomo, A. H. (2017). Analisis Ex-Ante Keberlanjutan Program Minapolitan. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 6(1), 61-81. Doi: <http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v6i1.5756>
- Undang-undang No. 23 Tahun 2009 Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007.
- Yuliani, S., & Rosyida, G. P. D. (2017). Kolaborasi dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta. *Jurnal Wacana Publik*, 1(2), 33-47.